



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

18– 19 April 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

19 / 04 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Senin, 18 April 2022	+
	MEDIA	https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-794284444/pembangunan-tol-demak-tuban-dan-tol-ngawi-bojonegoro-babat-akan-mulai-tahap-persiapan-tahun-ini	
	JUDUL	Pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat akan Mulai Tahap Persiapan Tahun Ini	
	NARASUMBER	Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna	
	RESUME	Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR akan membangun tol penghubung Kabupaten Demak-Kabupaten Tuban. Proyek tol tersebut juga nantinya akan melawati beberapa desa dan kecamatan yang panjangnya akan mencapai 171,934 kilometer, dan ruas terpanjang di Kabupaten Tuban yaitu sepanjang 53,8 kilometer. Pada tahun 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek yang dalam tahap transaksi, sehingga total terdapat 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi Rp332,59 triliun. Enam proyek di bidang jalan dan jembatan diantaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi. Ke-10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim), Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan-Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Bogo-Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir-Karawaci. Sedangkan di bidang Sumber Daya Air (SDA) terdapat Bendungan Merangin di Jambi yang sedang tahap penyiapan KPBU dan Bendungan Bodri serta pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano-NTB yang sedang dalam tahap transaksi.	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

19 / 04 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 18 April 2022 https://www.solopos.com/rumah-subsidi-jauh-dari-pusat-keramaian-begini-alasannya-1298360 Rumah Subsidi Jauh Dari Pusat Keramaian, Begini Alasannya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna Pemerintah terus menggenjot penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus menyediakan rumah terjangkau dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP). Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan hal itu karena sejumlah faktor pembentukan harga rumah FLPP sesuai dengan ketentuan pemerintah. Meski rumah yang dibangun adalah rumah subsidi, para pengembang tetap adalah pelaku usaha. Tentu hunian yang dibangun akan tetap memperhitungkan aspek keuntungan usaha. Sementara, pemerintah diminta untuk membuat peta jalan (road map) atau blue print pembangunan rumah menengah bawah agar dapat menyejahterakan kelompok masyarakat tersebut.	+
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 18 April 2022 https://investor.id/business/290932/pupr-targetkan-5-juta-unit-rumah-dalam-5-tahun PUPR Targetkan 5 Juta Unit Rumah Dalam 5 Tahun Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses rumah layak huni. Target pemerintah selama kurun waktu 5 tahun menargetkan 5 juta unit rumah. Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada tahun 2022 menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan. mulai dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

19 / 04 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

		rumah. Kedua Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.	
4	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 18 April 2022 https://www.tribunnews.com/properti/2022/04/18/kementerian-pupr-minat-pengembang-bangun-rumah-subsidi-masih-cukup-tinggi Kementerian PUPR: Minat Pengembang Bangun Rumah Subsidi Masih Cukup Tinggi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto membantah bahwa pengembang properti belum masif bangun rumah subsidi . Minat pengembang masih cukup tinggi untuk membangun rumah subsidi , didukung Kementerian PUPR memiliki beberapa program subsidi pembiayaan perumahan.	+



18 / 04 / 2022

| Sumber: portalkudus.com

Pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat akan Mulai Tahap Persiapan Tahun Ini

Editor: Candra Kartiko Sari

Portal Kudus - Pemerintah Pusat melalui [Kementerian PUPR](#) akan membangun tol penghubung Kabupaten Demak-Kabupaten Tuban.

Nantinya, tol tersebut akan melewati beberapa kabupaten di Jawa Tengah yaitu Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. Sedangkan di Jawa Timur yaitu Kabupaten Tuban.

Proyek tol tersebut juga nantinya akan melewati beberapa desa dan kecamatan yang panjangnya akan mencapai 171,934 kilometer, dan ruas terpanjang di Kabupaten Tuban yaitu sepanjang 53,8 kilometer.

Pembangunan tol Demak-Tuban dan tol Ngawi-Bojonegoro-Babat (Ngaroban) serta beberapa tol lainnya masuk skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tahun 2022.

Pembangunan tol Demak-Tuban dan tol Ngawi-Bojonegoro-Babat (Ngaroban) tahun ini masuk persiapan.

"Jalan tol Demak-Tuban, dan jalan tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap persiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna dikutip [muria.suaramerdeka.com](#) dari laman Kemen PUPR pada Sabtu 16 April 2022.

Dia mengatakan, pada tahun 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap persiapan KPBU dan 16 proyek yang dalam tahap transaksi, sehingga total terdapat 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi Rp332,59 triliun.

"Enam proyek di bidang jalan dan jembatan diantaranya untuk [pembangunan](#) Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap persiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi," kata Herry.

Ke-10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim), Jalan Tol Kohod (Paku Haji)-Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan-Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir-Karawaci.

Sedangkan di bidang Sumber Daya Air (SDA), Herry mengatakan terdapat Bendungan Merangin di Jambi yang sedang tahap persiapan KPBU dan Bendungan Bodri serta pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano-NTB yang sedang dalam tahap transaksi.



18 / 04 / 2022

Sumber: portalkudus.com

Selanjutnya di bidang perumahan, Herry menyebutkan terdapat dua proyek Rumah Susun (Rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan, yakni . Rusun Karawang Spuur–Karawang dan Rusun IKN Tahap I. Sedangkan terdapat dua rusun yang sudah dalam tahap transaksi yakni Rusun Cisaranten di Bandung dan Rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan [pembangunan](#) infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model pembiayaan salah satunya

lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun.

Sebab berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020–2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

<https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-794284444/pembangunan-tol-demak-tuban-dan-tol-ngawi-bojonegoro-babat-akan-mulai-tahap-persiapan-tahun-ini>



18 / 04 / 2022

Sumber: solopos.com

Rumah Subsidi Jauh Dari Pusat Keramaian, Begini Alasannya

Editor: Ahmad Mufid Aryono

Solopos.com, SOLO—Pemerintah terus menggenjot penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus menyediakan rumah terjangkau dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP).

Meski terus menyediakan rumah subsidi, namun, sebagian besar rumah subsidi berlokasi jauh dari pusat keramaian. Lantas apa yang menjadi alasan rumah bersubsidi jauh dari pusat keramaian.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan hal itu karena sejumlah faktor pembentukan harga rumah FLPP sesuai dengan ketentuan pemerintah.

“Melihat fakta. Karena pembentuk harga rumah itu ada biaya konstruksi, ada harga tanah dan harga lain-lain, izin juga,” ujar Herry, pekan lalu.

Inilah yang membuat para pengembang rumah subsidi memilih lokasi yang harga tanahnya lebih murah. Konsekuensinya, lokasi rumah FLPP yang dibangun jadi jauh dari pusat ekonomi.

“Harga tanahnya ini, nggak naiknya apa auto bisa going concern niatnya beli tanah di sini, harganya akan naik. Akhirnya makin lama makin jauh dan seterusnya,” jelas Harry.

Meski rumah yang dibangun adalah rumah subsidi, para pengembang tetap adalah pelaku usaha. Tentu hunian yang dibangun akan tetap memperhitungkan aspek keuntungan usaha.

“Ya tadi karena dia mengoptimalkan keuntungannya dan membuat harga pokok penjualan (HPP) nya tadi masuk dengan capability, dengan kemampuan masyarakat. Kalau makin nggak terlalu tinggi, makin nggak menjangkau akhirnya. Untuk mempertahankan sepertiga pendapatannya tadi kan, carilah harga tanah yang masih masuk di sini,” papar dia.

Sementara, pemerintah diminta untuk membuat peta jalan (road map) atau blue print pembangunan rumah menengah bawah agar dapat menyejahterakan kelompok masyarakat tersebut.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan saat ini rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama subsidi, berada jauh dari pusat kota yang sulit dengan akses transportasi umum.

“Rumah subsidi makin lama makin terpinggirkan. Karena harga tanah ini cepat naik sehingga rumah subsidi mencari tanah-tanah yang masih murah,” ujar dia beberapa waktu lalu.

Hal ini tentu menyebabkan beban masyarakat menengah bawah untuk tinggal di rumah subsidi bakal naik karena biaya



18 / 04 / 2022

Sumber: solopos.com

transportasi ke tempat kerja. Menurutnya, pemerintah perlu membuat blue print wilayah mana saja yang akan dibangun rumah subsidi.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar harga tanah di wilayah yang akan dibangun rumah subsidi tak naik.

“Satu kawasan untuk rumah subsidi. Diberikan akses ke sana dengan TOD [Transit Oriented Development] dengan ini minat rumah subsidi akan besar dan pemerintah akan berhasil merumahkan masyarakat,” papar dia.

Selain itu, Ali mengusulkan pembangunan rumah subsidi dapat dilakukan di tanah milik pemerintah pusat, BUMN maupun BUMD. Hal itu dikarenakan lokasi tanah

milik pemerintah berada di wilayah strategis.

“Ini tentu perlu payung hukum. Jadi bisa dengan bank tanah, tanah milik pemerintah pusat dan daerah yang statusnya idle bisa dibangun rumah MBR,” katanya.

Selama ini, para pengembang swasta yang membangun rumah subsidi mencari tanah sendiri dengan kendala harga tanah yang mengalami kenaikan seiring waktu. Oleh karena itu, lanjut Ali, pemerintah perlu turun tangan membuat blue print rumah MBR dan mengamankan harga tanah di kawasan yang akan dibangun rumah subsidi.

<https://www.solopos.com/rumah-subsidi-jauh-dari-pusat-keramaian-begini-alasannya-1298360>



18 / 04 / 2022

Sumber: investor.id

PUPR Targetkan 5 Juta Unit Rumah Dalam 5 Tahun

Author: Imam Muzakir

JAKARTA, **investor.id** -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses rumah layak huni. Target pemerintah selama kurun waktu 5 tahun menargetkan 5 juta unit rumah.

“Sasaran kami untuk bisa membangun rumah menjadi 5 juta rumah dalam lima tahun dan dukungan pemerintah setiap tahun terus meningkat termasuk tahun 2022 ini,” kata Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, di Jakarta, belum baru baru ini.

Menurut Zainal, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni di beberapa daerah. Karena itu pemerintah akan terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75% menjadi 70% pada 2020-2024.

Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada tahun 2022 menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan, mulai dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kedua Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.

Tahun 2022 Ditjen Perumahan memiliki anggaran sebesar Rp 5,208 triliun yang akan digunakan untuk membangun 5.141 unit rumah susun dengan anggaran Rp2,007 triliun. Rumah khusus sebanyak 2.872 unit, rumah swadaya 90,196 unit dan rumah umum 20.500 unit.

Pemerintah juga mendorong, di wilayah perkotaan untuk membangun rumah susun yang layak dan dengan harga terjangkau. Terutama diperuntukkan bagi para milenial yang belum memiliki rumah. Karena diperkirakan 2030 mendatang 60% penduduk Indonesia akan dikuasai usia produktif dalam hal ini milenial dan ini menjadi tantangan baru.

“Untuk wilayah perkotaan kami mendukung dibangunnya hunian vertikal dan dengan konsep transportasi massal,” ujarnya.

<https://investor.id/business/290932/pupr-targetkan-5-juta-unit-rumah-dalam-5-tahun>



18 / 04 / 2022

Sumber: tribunnews.com

Kementerian PUPR: Minat Pengembang Bangun Rumah Subsidi Masih Cukup Tinggi

Penulis: Yanuar R Yovanda

Editor: Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Direktur Jenderal Perumahan [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat](#) (PUPR) [Iwan Suprijanto](#) membantah bahwa pengembang properti belum masif bangun [rumah subsidi](#).

Iwan mengungkapkan, minat pengembang masih cukup tinggi untuk membangun [rumah subsidi](#), didukung Kementerian PUPR memiliki beberapa program subsidi pembiayaan perumahan.

"Satu di antaranya adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melihat data FLPP 3 tahun terakhir, realisasi penyaluran dana FLPP terus meningkat," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (18/4/2022).

Pengusul FLPP melalui aplikasi Sikumbang yaitu pengembang yang

membangun [rumah subsidi](#) juga meningkat setiap tahunnya.

Hal ini dinilai Iwan menandakan pembangunan [rumah subsidi](#) oleh pengembang terus meningkat, seiring dengan beberapa kemudahan pembiayaan dan bantuan perumahan yang diberikan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dia menambahkan, capaian realisasi FLPP tahun 2017 adalah 23.763 unit, meningkat menjadi 57.939 unit tahun 2018.

"Realisasi di 2019 adalah 77.835 unit dan meningkat menjadi 109.253 unit di 2020, sedangkan capaian di 2021 adalah 178.728 unit," pungkasnya.

<https://www.tribunnews.com/properti/2022/04/18/kementerian-pupr-minat-pengembang-bangun-rumah-subsidi-masih-cukup-tinggi>